

Editorial Commentary**Human Rights in Indonesia: Between Protection, Fulfillment, and Law Enforcement****Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum****Khoiril Huda**

Director of UKM Lex Scientia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Ridwan Arifin

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

The realm of human rights presents a complex interplay between protection, fulfillment, and law enforcement, particularly evident in the case of Indonesia. This abstract delves into the multifaceted landscape of human rights within the Indonesian context. Indonesia's transition to democracy marked an important juncture for human rights. The government ratified numerous international treaties and established a National Human Rights Commission, reflecting its commitment to protection. However, challenges persist as minority rights, notably those of religious and ethnic groups, face intermittent infringement, revealing gaps between rhetoric and reality. Fulfillment of rights poses another intricate facet. Economic and social rights, essential for human dignity, demand equitable distribution of resources. Indonesia's progress is discernible in poverty reduction and improved healthcare and education. Nevertheless, regional disparities and the indigenous population's marginalization warrant attention to ensure holistic rights fulfillment. Effective law enforcement remains central to the human rights discourse. The nation's counterterrorism efforts have sometimes raised concerns regarding due process and freedom of expression. Additionally, the protection of civil liberties necessitates consistent law enforcement reforms, emphasizing accountability, transparency, and the independence of the judiciary.

Keywords: Human Rights, Insight from Indonesia, Indonesia's Experience, Law Enforcement, Human Rights Protection

DARI PERJALANAN WAKTU, lembaga LEX SCIENTIA FH UNNES yang berumur tujuh tahun sudah memiliki jurnal mahasiswa LeSRev dan di tahun 2018 kembali mencetak pembaharuan. Pembaharuan utama terlihat dari terbukanya *submit* jurnal kepada eksternal FH UNNES. Pada bagian Board of

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>

Copyrights © 2018 Author(s). Published by Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Editors, LeSRev juga menggandeng KSP Principium UNS dan FPPH Palapa UGM sebagai lembaga keilmiah fakultas hukum di masing-masing Universitas tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua pihak yang bekerja bersama dalam penyusunan dan pencetakan Jurnal LeSRev Volume 2 Nomor 2 ini.

Usulan Jurnal Mahasiswa Lex Scientia Law Review, awalnya meupakan usulan yang bagi pengurus LeSRev sebagai mahasiswa yang bisa dikatakan sangatlah sulit untuk mengurusnya. Namun, di luar itu ternyata kami bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami. Pak Ridwan Arifin, S.H.,LL.M, salah satu dosen kami yang senantiasa mendampingi LeSRev meyakinkan kami dan memberi ruang kebebasan dalam penyusunan jurnal ini. Usulan beliau untuk lebih mempublis LeSRev menjadikan jurnal ini mulai dikenal hingga nasional, ditambah dengan masuknya UKM Lex Scientia kedalam pengurus Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia di tahun 2018.

Bukan hanya Pak Ridwan Arifin, S.H.,LL.M, Dosen Pendamping karya ilmiah fakultas juga seringkali memberi dukungan kepada pengurus LeSRev. Terutama sekali, ibu Waspiyah,S.H.M.H., yang merupakan pendamping UKM Lex Scientia dan Ibu Dian Latifiani selaku dosen pendamping karya ilmiah FH yang juga menjadi perwakilan FH di Universitas Negeri Semarang yang senantiasa memberi masukan kepada pengurus. Keberadaan beliau sangat membantu kami disaat kami mulai bingung dan menemukan kendala dalam penyusunan jurnal ini.

Keberadaan jurnal LeSRev sangatlah membantu kalangan mahasiswa sebagai wadah untuk menuangkan pendapat dan fikiran melalui tulisan ilmiah. Kehadiran jurnal ini menjadi terobosan bagi sivitas akademika karena sepenuhnya dikelola oleh mahasiswa dan memberi ruang bagi mahasiswa hukum se-Indonesia yang menginginkan tulisannya dimuat dalam bentuk jurnal. Jurnal menjadi salahsatu sarana berargumentasi, berpikir analisis, dan berpikir kritis serta menggunakan kelogisan ilmiah dalam bentuk tulisan. Jurnal ini hadir sebagai jurnal kedua yang dikelola oleh mahasiswa secara penuh, dimana yang pertama seperti yang kami ketahui ada Jurnal Juris Gentium Law Review milik kawan-kawan Komunitas Peradilan Semu International FH UGM dan yang kedua ini adalah jurnal yang ada dihadapan para pembaca saat ini.

Jurnal LeSRev pada kali ini mempersesembahkan Jurnal volume 2 nomor 2 sebagai kado istimewa bagi Fakultas Hukum dan akan di *Launching* secara resmi untuk Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang kami cintai. Terimakasih banyak kami haturkan kepada segenap penulis artkel dan *book review* yang mensubmit tulisannya. Kami ucapkan selamat kepada penulis yang artikelnya dimuat pada edisi ini. Permohonan maaf kami sampaikan kepada penulis yang tulisannya belum sesuai kriteria dan beberapa tulisan yang masih belum dimuat dikarenakan jumlah yang terbatas untuk dimuat dalam edisi kali ini.

Edisi kali ini membawa tema hak asasi manusia, dimana tema hak asasi manusia melibatkan dinamika kompleks antara perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hukum, khususnya dalam konteks Indonesia (Arifin, 2017; Ali, 2017). Topik ini menggali gambaran yang kompleks terkait hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Transisi Indonesia menuju demokrasi merupakan titik balik penting bagi hak asasi manusia. Pemerintah meratifikasi berbagai traktat internasional dan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mencerminkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Namun, tantangan masih ada karena hak-hak minoritas, terutama hak-hak kelompok agama dan etnis, kadang-kadang mengalami pelanggaran, mengungkap kesenjangan antara retorika dan kenyataan (Anif & Dewi, 2018; Hanif, 2015; Lubis, 2017).

Pemenuhan hak juga merupakan aspek yang rumit. Hak ekonomi dan sosial, penting bagi martabat manusia, menuntut distribusi sumber daya yang adil. Kemajuan Indonesia terlihat dari penurunan kemiskinan serta peningkatan akses kesehatan dan pendidikan. Namun, disparitas antar wilayah dan marginalisasi penduduk pribumi memerlukan perhatian agar pemenuhan hak menjadi lebih holistic (Bruun & Jacobsen, 2003; Mcguire, 2016; Muhtada, 2017).

Penegakan hukum yang efektif tetap menjadi inti perbincangan hak asasi manusia. Upaya penanggulangan terorisme kadang-kadang menimbulkan keprihatinan terkait proses hukum yang adil dan kebebasan berekspresi. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan sipil memerlukan reformasi penegakan hukum yang konsisten, dengan menekankan akuntabilitas, transparansi, dan independensi kekuasaan kehakiman (Wright, 2003; Selyawati & Dewi, 2017).

Sebagai kesimpulan, lanskap hak asasi manusia di Indonesia mencakup sejumlah pencapaian dan tantangan. Mekanisme perlindungan dan kerangka kerja institusional menunjukkan niat positif, namun pengalaman kelompok minoritas menunjukkan kesenjangan dalam implementasinya (Towadi, 2017). Pemenuhan hak yang adil memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Memperkuat mekanisme penegakan hukum juga sama pentingnya, dengan menemukan keseimbangan antara langkah-langkah keamanan dan preservasi kebebasan mendasar. Pendekatan holistik yang mencakup perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hukum menjadi kunci dalam mengarahkan Indonesia menuju masa depan di mana hak asasi manusia diakui dan dihormati secara universal.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum UNNES dan segenap pimpinan, Ibu Dekan Dr.Rodiyah, S.Pd,S.H,M.Si., Bapak Tri Sulistiyono S.H.M.H, Sekaligus Wakil Dekan Kemahasiswaan FH UNNES yang memberikan ruang bagi pengurus LeSRev dalam penerbitan edisi jurnal ini.

Referensi

- Ali, Mahrus. "Inserting a Human Rights Approach into Penal System And Corruption Judicial Decision in Indonesia." *Researchers World* 8, No. 1 (2017): 117.
- Anif, Virdatul, and Galuh Mustika Dewi. "Quo Vadis of Politics of Law of Human Rights Protection Policy in Indonesia". *Lex Scientia Law Review* 1, No. 1 (2017): 5-18. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19453>.
- Arifin, Ridwan. "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, No. 1 (2017):, 79-82. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16642>.
- Bruun, Ole, and Michael Jacobsen. *Human rights and Asian values: Contesting national identities and cultural representations in Asia*. (London: Routledge, 2003).
- Hanif, Muhammad Miftakhuddin. "Reviving the Sense of Deterrent Effects To Prisoners Inside Penal Institutions". *Unnes Law Journal* 4, No. 2 (2015). <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i2.38780>.
- Lubis, Muhammad. "The Relationship of International Human Rights Law With International Humanitarian Law in Situations of International Armed Conflicts". *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, No. 1 (2017): 13-34. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16565>.
- Mcguire, Hannah. "Indonesian Law Reform and the Promotion of Justice: An Analysis of Law Reform in the Post-Soeharto Period." *Brawijaya Law Journal* 3, No. 1 (2016): 60-78.
- Muhtada, Dani. "Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, No. 1 (2017): 1-2. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16720>.
- Selyawati, Ni Putu, and Maharani Chandra Dewi. "Implementation of Universal Human Rights Values Based on the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia". *Lex Scientia Law Review* 1, No. 1 (2017): 41-56. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19481>.
- Towadi, Mellisa. "The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, No. 1 (2017): 43-54. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16637>.
- Wright, Shelley. *International human rights, decolonisation and globalisation: Becoming human*. (London: Routledge, 2003).